

## ABTRAKS

### **Pasya Alrapee Dilivhio, 1198010155: "Evaluasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Gerakan Tanah di Kecamatan Cimanggung".**

Kabupaten Sumedang merupakan wilayah yang berbukit dengan ketinggian 25 m – 1.667 m di atas permukaan laut. Salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang adalah Kecamatan Cimanggung. Di Kecamatan Cimanggung sendiri berdiri banyak perumahan yang sebagian besar dibangun di Kawasan dataran tinggi. Hal tersebut menimbulkan permasalahan serius, puncaknya ialah ketika terjadi bencana longsor di tahun 2021 silam. Bencana tersebut disinyalir terjadi akibat izin pembangunan perumahan yang serampangan. Apalagi lokasinya berada di tanah rawan pergeseran tanah. Pasca kejadian tersebut, Pemerintah Sumedang menerbitkan Perbup No. 22 Tahun 2021 Tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Gerakan Tanah untuk penertiban izin pembangunan perumahan di Kawasan Sumedang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kecamatan Cimanggung yang diukur melalui Proses pelaksanaan peraturan, input dari peraturan tersebut, outputs dari peraturan yang dibuat, serta outcomes dari peraturan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yaitu dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dari penelitian ini ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan menurut Fajar Nurcholli (2007), yang mana di dalamnya terdapat empat indikator dalam mengevaluasi suatu kebijakan yakni melalui proses pelaksanaan kebijakan, input dari kebijakan yang merupakan masukan seperti Sumber daya pendukung, outputs dari kebijakan yang merupakan hasil, serta yang terakhir outcomes yang merupakan dampak dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pelaksanaan Perbup Sumedang No. 22 Tahun 2021 sudah sesuai dengan sarannya yaitu lebih terkendalinya pembangunan Perumahan di Cimanggung. Sementara itu, input dari Perbup ini belum optimal karena kurangnya SDM serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Outputs dari Perbup ini sudah cukup baik sebab telah mampu mengontrol pihak-pihak baru yang ingin mendirikan perumahan khususnya di wilayah Cimanggung. Dan outcomes dari Perbup ini belum maksimal karena belum adanya manfaat dan dampak yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Cimanggung.

**Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Perizinan Pembangunan Perumahan, Cimanggung**

## ABSTRACT

***Pasya Alrapee Dilivhio, 1198010155: "Evaluation of Sumedang Regent's Regulation Number 22 of 2021 Concerning the Moratorium on Housing Development Permits in Land Movement Areas in Cimanggung District".***

*Sumedang Regency is a hilly area with a height of 25 m – 1,667 m above sea level. One of the sub-districts in Sumedang Regency is Cimanggung District. In Cimanggung District itself there are many housing developments, most of which were built in highland areas. This caused serious problems, the peak of which was when the landslide disaster occurred in 2021. The disaster was allegedly caused by haphazard housing construction permits. Moreover, the location is on land prone to land shifting. After this incident, the Sumedang Government issued Perbup no. 22 of 2021 concerning the Moratorium on Housing Construction Permits in Land Movement Areas for controlling housing development permits in the Sumedang Area.*

*This study aims to evaluate Sumedang Regent Regulation Number 22 of 2021 concerning Moratorium on Housing Development Permits in Land Movement Areas in Cimanggung District as measured through the process of implementing regulations, the inputs of these regulations, the outputs of regulations made, and the outcomes of these regulations.*

*The type of research used in this study is descriptive qualitative which intends to provide a clear picture of the problem under study. Data collection techniques are from the results of interviews, observation and documentation. While the data analysis techniques of this study are data reduction, data presentation, and conclusion and verification.*

*The theory used in this study is the theory of policy evaluation according to Fajar Nurcholis (2007), in which there are four indicators in evaluating a policy, namely through the process of implementing policies, inputs from policies which are inputs such as supporting resources, outputs from policies which are results, and finally the outcomes which are the impact of the policy.*

*Based on the research results, the process of implementing Perbup Sumedang No. 22 of 2021 is in accordance with the target, namely more controlled housing development in Cimanggung. Meanwhile, the input from this Perbup is not optimal due to the lack of human resources and the required facilities and infrastructure. The outputs from this Perbup are quite good because they have been able to control new parties who want to build housing, especially in the Cimanggung area. And the outcomes of this Perbup have not been maximized because there are no benefits and impacts that are felt by most of the people of Cimanggung.*

***Keywords: Policy Evaluation, Housing Development Licensing, Cimanggung***